



Subjek Pemberdayaan Masyarakat dalam Al-Quran dan Sunnah

Masrul Efendi Umar Harahap

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan

(E-mail: harahapmasrulefendiumar@gmail.com)

Abstract: Public welfare is currently a major problem in various parts of the world, especially in Indonesia, many empowerment programs made by the government to improve people's welfare are not in line with expectations, even causing new problems. Therefore it is necessary to review the nature of community empowerment from a different perspective. In this article the author is interested in examining the nature of community empowerment in Al-Quran and Sunnah which is seen from the four characteristics of empowerment namely, empowerment that is *fardiyah*, *jam'iah*, *umara'* and isolated communities by using literature studies and sociological approaches that are following the concept of community empowerment. The results of this study are, firstly the term empowerment in Al-Quran and Sunnah is in line with *da'wah*, the culprit is referred to as *da'i* and the action is referred to as "*amar ma'ruf nahi munkar*" which is equally inviting people to change for a better approach individual. The second empowerment in the form of organization/institution and government is called *jam'iyah* which means a group of people who have the power to make the right decision with consideration of the benefit of the community. Thirdly an empowering agent is called *umara'* who is demanded to be able to carry out his duties and maintain the mandate entrusted to him, the four isolated communities are the main objects of empowerment activities, preachers or perpetrators must have special abilities that can find appropriate solutions to overcome problems and be able to develop the potential of the community.

Keyword: Subject of Empowerment, Al-Qur'an, and Sunnah

Abstrak: Kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi masalah utama diberbagai belahan dunia khususnya di Indonesia, banyak program-program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak sesuai dengan harapan, bahkan malah menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu perlu mengkaji kembali hakikat pemberdayaan masyarakat dari sudut pandang yang berbeda. Didalam artikel ini penulis tertarik untuk mengkaji hakikat pemberdayaan masyarakat dalam Al-Quran dan Sunnah yang dilihat dari empat sifat pemberdayaan yaitu, pemberdayaan yang bersifat *fardiyah*, *jam'iah*, *umara'* dan masyarakat terisolir dengan menggunakan kajian pustaka dan pendekatan sosiologis yang sesuai dengan konsep

pemberdayaan masyarakat. Adapun hasil dari kajian ini yaitu, pertama istilah pemberdayaan di dalam Al-Quran dan Sunnah sejalan dengan dakwah, pelakunya disebut sebagai *da'i* dan aksinya disebut sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu sama-sama mengajak manusia kepada perubahan yang lebih baik dengan pendekatan individual, kedua pemberdayaan dalam bentuk organisasi/lembaga dan pemerintahan disebut *jam'iyah* yang memiliki arti sekumpulan orang yang memiliki kuasa membuat sebuah keputusan yang tepat dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, ketiga seorang pelaku pemberdaya disebut sebagai *umara'* yang dituntut mampu menjalankan tugas dan menjaga amanah yang dititipkan kepadanya, keempat masyarakat terisolir merupakan objek utama dari kegiatan pemberdayaan, *da'i* atau pelaku pemberdayanya harus memiliki kemampuan khusus yang mampu mencari solusi-solusi tepat dalam mengatasi masalah serta mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

Key word: Subject of Empowerment, Al-Qur'an and Sunnah

A. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu program unggulan pemerintah dengan tujuan mengatasi masalah kemiskinan dengan cara mengembangkan perekonomian masyarakat diberbagai sektor melalui metode pemberdayaan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat. Namun dalam kegiatan pemberdayaan sering ditemukan berbagai masalah yang muncul dari kegiatan pemberdayaan, seperti tidak memahami kondisi masyarakat, program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tahapan yang tidak sesuai dengan tahapan-tahapan pemberdayaan. Masalah tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk dicarikan solusinya, salah satunya dengan cara memberikan pemahaman kepada setiap pelaku (subjek) pemberdayaan baik itu dari kelompok/organisasi ataupun pemerintahan, pelaku pemberdayaan dituntut tidak hanya memahami pemberdayaan itu dari teori-teori barat saja, namun perlu juga memahami konsep pemberdayaan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu pelaku pemberdaya harus memiliki sifat *fardiyah*, *jam'iyah*, *umara'* dan masyarakat terisolir, sifat tersebut menjadi hal yang sangat mendasar untuk bisa dipahami dan dimiliki oleh setiap pelaku pemberdayaaan masyarakat guna mendapatkan hasil maksimal dari setiap aksi pemberdayaan.

Sementara hasil dari kegiatan pemberdayaan dibuktikan dengan perubahan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu meningkatkan taraf hidup, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat baik materil maupun spiritual. Menurut M.Quraish Shihab konsep pembangunan

(pemberdayaan) harus bersifat menyeluruh, menyentuh dan menghujam ke dalam jati diri manusia, dengan demikian ajaran tersebut dapat membangun manusia seutuhnya, baik dari segi materil dan spiritual secara bersamaan.¹ Dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat diatas seyogyanya pelaku pemberdayaan yang sifatnya pribadi, kelompok, dan pemimpin yang amanah memberikan layanan serta bantuan pada masyarakat. Khususnya yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat.² Selanjutnya pelaku pemberdayaan dan masyarakat harus semakin dekat persamaan visi, karena bukan sekedar bertugas menyampaikan akan tetapi menjadi jembatan untuk memfasilitasi masyarakat. Hal ini akan memfasilitasi masyarakat agar mampu memahami diri, masalah dan potensi mereka, untuk suatu proses transformasi baik dari aspek sosial, politik, dan psikologi menuju yang dikehendaki masyarakat.

Sementara itu dalam konteks dakwah kemberdayaan adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha untuk mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar pada usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, akan tetapi harus menuju sasaran yang luas yaitu harus lebih berperan menuju pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Landasan teoretis

Subjek Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Masyarakat Bersifat Fardiyah

Subjek pemberdayaan bersifat perseorangan disebut juga Fardiyah, yang berasal dari kata *farada* berarti sendiri. Dalam Al-Quran kata fardiyah dalam berbagai bentuk ada enam yaitu pada Q.S. Maryam: 80 dan 95, Q.S. Al-Anbiya': 89, Q.S. Al-An'am: 94, Q.S. Saba'; 46. Ayat yang paling mendekati dalam pembahasan ini adalah Q.S. Saba'; 46.

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat, Cet .Ke-18*, (Bandung: Mizan, 2004), h. 301.

² Wahjudin Sumpeno, *Modul Pelatihan Pra Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaa*, (Jakarta: Kemendes, 2016), h. 12.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَنَّانًا وَفِرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ
جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras”.³

Dari ayat di atas pemberdayaan masyarakat dalam konteks dakwah fardiyah adalah keniscayaan. Sebab untuk mewujudkan masyarakat yang tegak di atas nilai-nilai Islam.⁴ Hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun individu-individu Islami sebagai komponen penyusun masyarakat. Dalam dakwah Fardiyah berdakwah utamanya harus melalui pendekatan personal, baik dari orang terdekat kita atau orang yang sama sekali baru kita jumpai atau baru berkenalan.⁵ Aktivitas dakwah semacam ini tentu bias menjadi pilihan utama yang bisa dilakukan setiap pribadi muslim dengan mengajak orang-orang terdekat, dalam dakwah fardiyah ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Pemahaman dan kematangan terhadap ajaran islam secara menyeluruh sebagai modal utama setiap da'i, begitu juga wawasan yang luas yang akan menjadi modal seorang da'i dalam mengatasi permasalahan dakwah dilapangan.
- b. Pemahaman terhadap latarbelakang atau keadaan psikologis masyarakat, karena setiap objek dakwah memiliki latar belakang masalah yang berbeda, sehingga solusi yang ditawarkanpun akan berbeda-beda.
- c. menyampaikan dakwah harus dengan metode yang tepat, seperti dengan pendekatan kekeluargaan, kata yang lembut dan penuh kasih sayang agar objek dakwah menaruh perhatian dan terpengaruh dengan ajakan kita.
- d. Setelah ikhtiar dakwah tersebut dilakukan juga harus dibarengi dengan doa agar dakwah yang kita sampaikan dapat diterima oleh masyarakat.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), h. 346.

⁴ Universitas Islam Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 377.

⁵M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 11 Qs. Saba, Ayat 46*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 405.

Posisi dakwah fardiyah merupakan aktifitas dakwah yang sangat penting dan pokok dalam melakukan perekrutan *ummat yang selektif*.⁶ Dakwah *Fardiyah* merupakan sebuah gerakan menjalin hubungan diantara sesama manusia dan memilih di antara beberapa orang untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan pertimbangan kelayakan yang dimilikinya yaitu kedekatan dan keistiqomahannya terhadap syariat Islam.

2. Pemberdayaan Masyarakat (*Jam'iah*)

Perkumpulan atau organisasi disebut dengan *jam'iyah* dan keagamaan disebut *diniyyah*, maka *jam'iyah diniyah* diartikan sebagai perkumpulan atau organisasi keagamaan yang sifatnya kolektif. Kolektif yang dimaksud sifatnya mengarah kepada *da'i* dan *mad'u*. *Da'i* yang dimaksud adalah sebagai juru bicara dan perpanjangan tangan sebuah lembaga atau organisasi keagamaan.⁷ Ketika seorang *da'i* berbicara atas nama organisasi yang diwakilinya itu merupakan cerminan dan perpanjangan tangan dari organisasi yang diwakilinya. Dalam Q.S. Al-'Ashr, Allah Swt., berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan nasehat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran".⁸

Ibnu Katsir menjelaskan sumpah Allah dengan waktu memiliki arti bahwa dalam waktu itulah setiap anak adam bergerak dalam kehidupannya berjalan. Manusia dalam kerugian diartikan semua manusia mengalami kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dengan ikhlas dengan seluruh perangkat tubuhnya yang menandakan bukti imannya terhadap Allah. Kemudian orang yang selalu berlomba-lomba menasehati di antara sesama dalam kebenaran dan kesabaran, menyeru kepada yang *ma'ruf* mencegah hal yang *mungkar*.⁹ Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ayat ini sangat penting sebagai renungan bagi setiap manusia, sehingga Imam Safi'i ra menyampaikan seandainya ayat ini tidak diturunkan Allah sebagai *hujjah* terhadap manusia niscaya Allah akan mencukupi mereka.

⁶ Ali Abdul Halim, *Dakwah Fardiyah Metode Pembentukan Pribadi Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 126.

⁷ Suhendra, K., *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: Alfabeta. 2006), h. 48.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 482.

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran (Di Bawah Naungan Al-Quran)*, (Bandung: Robbani Press, 2003), h. 94.

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tersebut bisa kita pahami bahwasanya semua manusia dalam keadaan merugi, dan jalan satu-satunya untuk keluar dari kerugian tersebut hanya dengan beramal saleh dan selalu menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jalan tersebut juga disebut dengan menyampaikan risalah dakwah (aktivitas dakwah). Rasulullah Saw., bersabda, “Setiap yang hadir agar menyampaikan kepada yang tidak hadir, sebab orang yang hadir barangkali akan menyampaikan kepada orang yang mungkin lebih paham darinya”.¹⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa aktivitas dakwah atau yang disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan daya dan upaya yang dimilikinya, sebab ketika seorang muslim sudah tidak menaruh perhatiannya terhadap aktivitas dakwah maka bisa dikatakan iman di dalam dirinya sudah tidak ada. Tanda seorang beriman bisa dilihat dari sejauh mana dia berusaha menyampaikan dakwah islamiyah.

Adapun pelaksanaan dakwah secara kolektif atau *jama'i*, dilihat dari sisi *da'i*, dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an, di antaranya: Dakwah yang sifatnya kolektif tersebut sesuai dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Dan hendaklah ada diantara segolongan ummat yang mengajak pada kebajikan, menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah hal yang mungkar dan merekalah orang yang beruntung.¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa aktivitas dakwah diawali dari individu yang kemudian bergabung dengan komunitas atau lembaga/organisasi dakwah, sehingga aktivitas dakwah dapat dilakukan dengan baik yang sifat menyeluruh dengan pengelolaan yang lebih efektif. Dalam istilah manajemen menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat.¹² Juga dengan menanamkan sifat saling percaya dan kesediaan serta kerelaan dari setiap anggota kelompok untuk saling tolong-menolong yang merupakan

¹⁰ Imam Muslim, *Kitab Al-Qisamah Nomor 1679*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), h. 9.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 93.

¹² Wayan Gede Supartha, *Pengantar Prilaku Organisasi*, (Denpasar: CV. Setia Bakti, 2017), h. 2.

modal sosial terpenting dalam suatu kelompok untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan bersama.¹³

Bila dikaitkan dengan masyarakat dalam sebuah negara maju dapat dilihat semakin bertambahnya masyarakat semakin meningkat pula partisipasinya di setiap aktivitas kehidupan kenegaraan.¹⁴ Dalam rangka mendukung dalam bentuk tuntutan, pengawasan segala kegiatan pemerintah dalam mencapai pemerintahan yang jujur, adil dan bersih (*good and clean governance*), untuk mewujudkan itu perlu adanya perhatian terhadap struktur organisasi yang mendukung kinerja strategis yang ditetapkan sebelumnya.¹⁵

Partisipasi masyarakat dalam tatanan negara tersebut merupakan wujud dari tumbuhnya sebuah proses demokrasi yang pada prakteknya saling mendukung di antara sesama warga negara itu sendiri. Bentuk dari partisipasi tersebut bisa dalam wujud organisasi-organisasi, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, dalam istilah internasional dikenal dengan *non-governmental organization (NGO'S)*. Sementara di Indonesia dikenal dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.¹⁶

Dalam perkembangannya, Ormas dan LSM di Indonesia mengalami kehidupan secara pasang-surut, yang lebih banyak sebagai akibat dari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa di masanya masing-masing. Perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib:

أَلْحَقُّ بِأَنْظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِالنَّظَامِ

“Kebenaran yang tidak diorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir”.¹⁷

Perkataan ini mengingatkan kita tentang pentingnya berorganisasi dan sebaliknya bahayanya suatu kebenaran yang tidak diorganisir melalui langkah-langkah

¹³ Andreas dan Enni Savitri, *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial*, (Pekanbaru, 2016), h. 19.

¹⁴ Sutrisno Kh dan Mary Johnston, *Membina Masyarakat Pembangunan Kasus-Kasus Pengembangan Masyarakat*, (Surakarta: Yayasan Indonesia Sejahtera, 1992), h. 12.

¹⁵ International Labor Organization, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Kerja Sama dan Usaha Yang Sukses*, (Jakarta: Labour Office, 2013), h. 4.

¹⁶ International Labor Organization, *Manajemen Sumber Daya Manusia...*, h. 4.

¹⁷ <https://www.gontor.ac.id/putri1/satukan-barisan-kuatkan-organisasi-dan-perjuangan-demi-kejayaan-ummat-islam>, diakses pada 13 Juli 2020.

yang kongkrit dan strategi-strategi yang mantap.¹⁸ Maka tidak ada garansi bagi perkumpulan apa pun yang menggunakan identitas Islam meski memenangkan pertandingan, persaingan maupun perlawanan jika tidak dilakukan pengorganisasian yang kuat.

3. Umara

Kata *Umara* dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pemimpin, penyelenggara, kepala, pemerintah, pengurus, pembimbing, pemangku, pengelola, pengatur.¹⁹ Secara istilah pemimpin juga disebut adalah seseorang yang membimbing dan menuntun orang-orang yang dipimpinya.²⁰ Dalam konteks Islam kata pemimpin berasal dari bahasa Arab yaitu *umara*.²¹ Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah: 112.

الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“... yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu”.²²

Ayat tersebut menggambarkan bahwa seorang pemimpin mempunyai tugas yang berat yaitu bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dalam kepemimpinannya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai pendekatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar dijelaskan, bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kamu akan dimintai pertanggungjawabannya dari setiap kepemimpinannya.²³ Pertanggungjawaban Kepala Negara terhadap rakyat yang dipimpinya, suami akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rumah tangga yang dipimpinya, istri dalam memelihara rumah tangganya begitu juga dengan pembantu dalam menjaga harta milik majikannya dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya atas setiap yang dipimpinya.

Keterangan dari hadis tersebut menerangkan bahwa tanggung jawab sebagai pemimpin itu sangatlah penting. Sebab kepemimpinan itu mencakup semua umat

¹⁸ Suhendra, K., *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan...*, h. 127.

¹⁹ Thoah Miftah., *Kepemimpinan dalam Manajemen*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h. 83.

²⁰ Dianto, I., “Kepemimpinan Komunitas: Studi Pemahaman Hadis Kepemimpinan di Tangan Bani Quraisy”, dalam *Jurnal at-Taghyir*, Vol. 2, no. 1, 2019, h. 14-29.

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2009), h. 48.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h. 163.

²³ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab: Jum'at Bab Alat Jum'at No. 844*, (Beirut: Dar as-Sa'bu, tt), h. 139.

manusia terkhusus seorang muslim yang pertanggung jawabannya akan ditanggung oleh masing-masing, maka dalam hal kepemimpinan tentu menjadi hal yang sangat pokok sekali untuk diperhatikan, kepemimpinan sebagai Kepala Negara, keluarga, seorang pembantu dan diri sendiri semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Terlepas dari pertanggungjawaban kepemimpinan tentu sebuah perubahan juga sangat dibutuhkan. Dengan kata lain harus ada bekas yang baik yang ditinggalkan ketika menjadi seorang pemimpin. Kebijakan-kebijakan yang dibuat guna mewujudkan masyarakat yang maju baik sebagai warga negara dan seorang muslim harus tetap bisa dipertahankan ketika kepemimpinan sudah berakhir. Begitu juga sebagai pemimpin yang baru harus tetap menjalankan kebijakan-kebijakan pemimpin sebelumnya dengan dasar kebijakan tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, manusia sebagai ciptaan Allah yang memiliki akal dan merupakan pembeda di antara ciptaan yang lain tentu ini menjadi dasar bahwa segala tanggungjawab yang diberikan harus dilaksanakan sesuai dengan akal sehat dan bukan hanya memanfaatkan kepemimpinannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang-orang di sekelilingnya, sebab fitrah dari penciptaan akal manusia adalah mempergunakannya sesuai dengan tuntunan Islam yaitu segala perbuatan harus didasari kepada akal sehat. Misalnya seorang pemimpin harus mengayomi dan mementingkan kemaslahatan warga dibanding dirinya, suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya, pembantu/pekerja harus amanah dalam menjaga harta majikannya dan setiap orang harus menjaga segala perbuatannya dari segala hal yang menimbulkan kemudharatan bagi dirinya sendiri dan juga merugikan orang banyak.²⁴

Seorang Kepala Negara misalnya tidak mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, suami istri yang tidak memberikan hak dan kewajibannya, pembantu yang tidak menjaga amanah majikannya. Semuanya itu merupakan perbuatan di luar fitrah penciptaan akal manusia. Yang seharusnya menjalankan apa yang menjadi

²⁴ Kartini, Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal itu?* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 125.

tanggungjawab setiap pemimpin terhadap kepemimpinannya baik perorangan, organisasi, rumah tangga dan Negara.

Perspektif Islam pemimpin disebut *khalifah* atau yang bertugas memimpin dan menuntun dalam menegakkan syariat Allah Swt.²⁵ Bertugas menekankan kepada masyarakat agar menjalankan segala aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya, sebab pemimpin dalam Islam merupakan pewaris para nabi yang bertugas menyampaikan dan menegakkan syariat-syariat Islam secara *kaffah*. Dalam Islam juga pemimpin itu diartikan sebagai pelayan masyarakat dan bukan dilayani oleh masyarakat. Sesuai dengan penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Maryam, bahwasanya Rasulullah Saw., menyampaikan siapa saja yang diberikan Allah tanggungjawab untuk mengurus kepentingan kaum muslim, dan ia tidak menjalankan tanggung jawab tersebut maka Allah akan menolak segala apa yang dibutuhkannya di hari kiamat nanti. Mendengar perkataan Nabi tersebut seketika itu juga Mu'awwiyah mengangkat seorang sebagai pelayan untuk mengurus segala kepentingan orang banyak.

Hadis di atas bila dipahami bahwa selama ini kedudukan pemimpin itu bukan seperti yang ada dipikiran kita yaitu sebagai orang yang dilayani bukan sebagai pelayan, maka dari itu hakikat pemimpin bila dipandang dari segi kedudukan levelnya lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang dilayani, masyarakat adalah raja yang segala kepentingannya dan keperluannya harus dipenuhi seorang pemimpin. Bila dianalogikan pemimpin sebagai pembantu rumah tangga sedangkan masyarakat sebagai majikan atau pemilik rumahnya. Contoh lain bila kaitkan dalam konteks bernegara, Presiden, Gubernur, Wali Kota/Bupati dan Kepala Desa merupakan pelayan atau pembantu bagi setiap masyarakat yang dipimpinnya sedangkan masyarakat adalah orang yang dilayani atau sebagai rajanya yang apabila pelayanan mereka tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka dengan sendirinya mereka akan mendapat hukuman dari Allah Swt.

Penjelasan di atas terkait kepemimpinan setiap orang harus benar-benar amanah dalam mengemban dan tugas yang diberikan, dalam pandangan Islam pemimpin itu harus mengarahkan dan membimbing rakyat yang dipimpin ke jalan yang benar sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh dalam proses menjalani kehidupan, maka Islam

²⁵ Ahmad Warison Munawwir, *Kamus al-Munawwir, Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 361.

menuntut pemimpin memiliki sifat kepemimpinan seperti Rasulullah yaitu: *As-Shiddiq* atau sikap jujur dan benar, *At-Tablig* atau penyampai kebenaran (*accountable* dan *auditable*), *Al-Amanah* atau dapat dipercaya dan *Al-Fathonah* atau cerdas atau pandai.²⁶

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment”, yang berarti “berkekuatan atau bertenaga”.²⁷ K. Suhendra mengartikan pemberdayaan sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif. Pada pelaksanaannya kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan usaha pemberdayaan yang memiliki tahapan yang baik, dalam prosesnya memiliki perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan yang baik pula.

Tahapan tersebut di atas merupakan upaya yang dilakukan guna memenuhi sebuah aksi pemberdayaan yang memiliki tanggungjawab, motivasi dan partisipasi yang besar setiap pelaku pemberdaya. Sebab dalam tahapan ini mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengontrolan memberikan pengaruh yang cukup besar, seperti perencanaan harus benar-benar program yang akan dibuat sesuai dengan potensi masyarakat, kelembagaan yang tepat, aksi yang bertanggung jawab dan pengontrolan dari setiap program yang dilaksanakan guna mengetahui kendala dan solusi yang bisa diambil dalam melanjutkan aksi selanjutnya.

Selain itu, upaya yang dilakukan melalui tahapan tersebut akan memberikan sebuah pendidikan dan partisipasi yang besar terhadap pelaku pemberdaya dalam mewujudkan tujuan yang dibangun bersama secara efektif dan efisien. Kemudian seorang pemimpin dalam aksi pemberdaya juga harus benar-benar memperhatikan para anggota khususnya pada kinerjanya, sebab kinerja merupakan kunci utama dalam mewujudkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pemberdayaan itu sendiri.

Adapun opsi utama yang bisa dilakukan pemimpin mewujudkan kinerja yang baik adalah dengan memotifasi para anggotanya agar tetap semangat dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dengan motifasi itu juga akan meyakinkan para anggota mampu mencapai tujuan dari pekerjaan yang diamanahkan kepada mereka. Pelaku,

²⁶ Muahaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 154.

²⁷ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), h. 82.

objek pemberdaya dan organisasi bisa merealisasikannya dengan baik apabila tahapan-tahapan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.

Opsi lain yang harus ditanamkan adalah dengan cara memberikan pelatihan atau pendidikan yang sesuai dengan tujuan pemberdayaan, sehingga para anggota memiliki wawasan dan informasi serta tumbuh partisipasi yang besar terhadap sesama anggota. Inilah yang menjadi opsi kedua yang dapat membantu atau menyokong berhasilnya sebuah aksi pemberdayaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Informasi dan partisipasi adalah dua hal yang juga tidak bisa terlepas dan harus tetap menjadi perhatian utama bagi pemimpin dalam menggerakkan para anggotanya dan bukan hanya dalam pemberdayaan melainkan juga setiap aspek yang membutuhkan keberhasilan setiap program yang dilaksanakan.

Dalam sebuah organisasi atau lembaga opsi itu direalisasikan dalam bentuk pembagian tugas pada masing-masing anggota akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Dengan pembagian tugas yang dilakukan merupakan bentuk pemberian sebuah kekuasaan yang diberikan kepada anggota sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat dan tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka. Dalam hal ini bila dilihat dari manfaat dari pelaksanaan dari opsi tersebut maka akan dijumpai beberapa manfaat yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan program pemberdayaan, yaitu:

- a. Menumbuhkan motivasi yang besar terhadap para anggota sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang dibebankan, karena pemberian kekuasaan terhadap setiap anggota sesuai dengan bidang masing-masing.

Dengan demikian, segala permasalahan dalam mewujudkan tujuan program-program pemberdayaan akan lebih mudah diselesaikan. Secara umum visi dan misi tercapai secara maksimal dengan kemampuan yang ditanamkan terhadap anggota terkait dengan beban tugas masing-masing, dan pada hakikatnya pemimpin adalah yang berhasil dalam memajukan dan mengayomi para anggota dalam meraih tujuan pemberdayaan tersebut, bukan hanya masyarakat yang berdaya melainkan juga para

pelaku yang semakin meningkat kemampuannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan porsinya.

Dalam konteks pemberdayaan pemimpin seperti ini menjadi pemimpin idaman, karena paham mengenai arti sebuah proses pemberdayaan yang bukan hanya fokus terhadap objek pemberdayaan melainkan terlebih dahulu memberdayakan palaku pemberdayaan itu sendiri. Sebab sebuah pemberdayaan yang dilakukan tanpa kemampuan yang cukup maka pemberdayaan tidak akan dapat terlaksana dengan baik, malah sebaliknya akan menimbulkan permasalahan baru.

4. Masyarakat Terisolir

Masyarakat terisolir adalah bagian dari target pemberdayaan menuju sebuah perubahan masyarakat yang mandiri dan berkembang. Konsep pemberdayaan memerlukan sebuah sikap yang subjektif dengan tujuan memahami dan melakukan gerakan pemberdayaan yang sesuai dengan hakikat pemberdayaan itu sendiri, yaitu dengan mengatasi setiap permasalahan sosial dan menemukan solusi-solusi terbaik yang memberikan dan mengarahkan kepada keadaan sebuah masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Deficit Based dan Strength bahwa pemecahan segala permasalahan yang ada dalam masyarakat keberhasilannya tergantung pada cara penerapan yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Cara dan penerapan yang tepat ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya timbul sebuah masalah dari cara penerapan dalam mengatasi masalah tersebut.²⁸

Kemudian di sisi lain ada pendekatan lain yang ditawarkan Strength Based yaitu metode *Appreciative Inquiry* yang terpusat pada sebuah potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang, lembaga atau organisasi menuju sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Pengertian lain bahwa metode ini memberikan suntikan kepada kapasitas individu agar terus melakukan hal yang positif yang dapat memberikan perubahan dan impian yang lebih baik di masa depan. Untuk memudahkan pemahaman terkait konsep tersebut perlu dipahami bahwa:

²⁸ Suhartini, Rr, dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), H. 85.

- a. Membangun masyarakat yang berdaya diperlukan kemampuan khusus masyarakat setempat dalam hal penggunaan fasilitatif dan partisipatif dalam proses pemberdayaan masyarakat.
- b. Semua potensi yang ada di tengah masyarakat harus difungsikan baik dia itu dari kalangan pemerintahan yang memiliki tujuan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga organisasai-organisasi yang memiliki peran dalam mendukung program-program pemberdayaan, seperti lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi mengawasi program yang dikucurkan untuk pembangunan masyarakat.

C. Penutup

Pemberdayaan dalam konteks Al-Quran dan Sunnah sejalan dengan konteks dakwah yaitu sama-sama mengajak manusia menuju kepada sebuah perubahan yang lebih baik. Dalam Al-Quran dan Sunnah disebut *amar ma'ruf nahi munkar*, sementara pelaku pemberdaya disebut sebagai da'i dan sudah menjadi tanggung jawab setiap orang yaitu dakwah fardiah, yang dilakukan dengan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat atau diri orang yang ingin diajak kepada sebuah perubahan yang lebih baik.

Aktivitas dakwah fardiyah dilaksanakan dengan metode khusus melalui pendekatan orang-orang terdekat kita yang ada di dalam atau di luar lingkungan kita, dan tidak menjadi penghalang terhadap orang yang baru kita jumpai atau baru berkenalan, kemudian mengajak dari beberapa orang untuk ikut bergabung dalam aktivitas dakwah dengan tujuan memudahkan pergerakan dakwah secara menyeluruh dengan pengelolaan atau manajemen yang baik. Selanjutnya sikap yang perlu ditanamkan dalam pemberdayaan adalah sikap subjektif yang didasarkan kepada permasalahan sosial yang dicarikan solusi-solusi terbaik yang memberikan perubahan keadaan yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab: Jum'at Bab Alat Jum'at No. 844*, Beirut: Dar as-Sa'bu, tt.
- Andreas dan Enni Savitri, *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial*, Pekanbaru, 2016.
- Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Darussunnah, 2011.

- Dianto, I., "Kepemimpinan Komunitas: Studi Pemahaman Hadis Kepemimpinan di Tangan Bani Quraisy", dalam *Jurnal at-Taghyir*, Vol. 2, no. 1, 2019, h. 14-29.
- Gede Supartha Wayan, *Pengantar Prilaku Organisasi*, Denpasar : CV. Setia Bakti, 2017
- Halim Ali Abdul, *Dakwah Fardiyah Metode Pembentukan Pribadi Muslim*, Jakarta Gema Insani, 1995
- <https://www.gontor.ac.id/putri1/satukan-barisan-kuatkan-organisasi-dan-perjuangan-demi-kejayaan-umat-islam>, Diakse pada 13 Juli 2020
- Hurairah Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008
- Inter National Labor Organization, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Kerja Sama Dan Usaha Yang Sukse*, Jakarta : Labour Office, 2013
- Kartini, Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal itu?*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Diponegoro, 2015
- Miftah Thoha., *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers. 1983
- Muahaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta : Kencana , 2004
- Munawwir Ahmad Warison, *Kamus al-Munawwir, Arab Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997
- Muslim Imam, *Kitab Al- Qisamah Nomor 1679*. Jakarta : Darul Haq, 2005
- Quthb Sayyid, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran Di Bawah Naungan Al-Quran*, Bandung:Robbani Press, 2003
- Shihab M. Qureish, *Membumikan Al-Qur'an:Fungsi dan peran wahyu Dalam Masyarakat*, Bandung : Mizan, 2004
- _____, *Tafsir al-Misbah Vol 11 (Qs. Saba, Ayat 46*, Jakarta : Lentera Hati, 2007
- Suhartini, Rr, dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat.*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2005
- Suhendra, K.. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung:Alfabeta. 2006
- Sumpeno Wahjudin, *Modul Pelatihan Pra Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaa*, Jakarta : Kemendes, 2016
- Sutrisno Kh dan Mary Johnston, *Membina Masyarakat Pembangunan Kasus-Kasus Pengembangan Masyarakat*, Surakarta : Yayasan Indonesia Sejahtera, 1992
- Universitas Islam Indonesia,"*Al-Quran dan Tafsirnya*", Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf,1990
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta:PT. Hidakarya Agung 2009